

**PENGARUH PAD, PMDN, TENAGA KERJA DAN IPM TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI****Gede Bayu Krhisna Bela¹
Djinar Setiawina²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: bayu.krhisnabela@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, PMDN, Tenaga Kerja dan IPM secara simultan dan parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali periode 2010-2016. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data adalah metode observasi non-partisipan, yaitu dengan mencari data dari Badan Pusat Statistik, Badan Penanaman Modal dan instansi terkait lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil uji dengan SPSS memperoleh hasil secara simultan variabel PAD, PMDN, Tenaga Kerja, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2016. Secara parsial PAD, PMDN, Tenaga Kerja, dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2016. Artinya, semakin tinggi PAD, PMDN, Tenaga Kerja dan IPM pada suatu daerah Kabupaten/Kota maka pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, PAD, PMDN, tenaga kerja, IPM

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of PAD, PMDN, Labor and HDI simultaneously and partially on Economic Growth in Bali Province 2010-2016. The data used in this study is secondary data. The method of data collection is a method of non-participant observation, namely by looking for data from the Central Statistics Agency, the Investment Board and other relevant agencies. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of the SPSS test obtained simultaneous results of PAD, PMDN, Labor, and IPM variables that significantly affected the Regency / City Economic Growth in Bali Province 2010-2016. Partially PAD, PMDN, Labor, and IPM have a positive and significant effect on Regency / City Economic Growth in Bali Province 2010-2016. That is, the higher the PAD, PMDN, Labor and HDI in a Regency / City area, the economic growth also increases.

Keywords: economic growth, PAD, PMDN, labor, HDI

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Alp Ozel, 2013). Sebagai daerah otonom, kabupaten/kota bertindak sebagai “motor penggerak” sedangkan pemerintah propinsi sebagai koordinator yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Nelly, 2007).

Salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan adalah kebijakan desentralisasi fiskal (Malik et al., 2006). Menurut Lin dan Liu (2000), desentralisasi fiskal dapat memberikan perubahan yang berarti untuk perekonomian di suatu daerah. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang berpengaruh pada kemajuan daerahnya (Widiana, 2015). Menurut Blane D. Lewis (2006) Pemerintah daerah di Indonesia mengelola pajak secara tidak efisien. Biaya rata – rata administrasi perpajakan setempat sebagai persentase dari pendapatan yang dihasilkan

diperkirakan lebih dari 50 persen. Otonomi daerah akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi sehingga akan mengalami tren positif.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Fajri, Arman Delis Dan Yohanes Vyn Amzar (2016) mengatakan pengaruh otonomi fiskal terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera berpengaruh negatif dan signifikan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah, sedangkan keterbukaan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Pertumbuhan ekonomi akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Wahyuni, 2014).

Penelitian yang dilakukan Peggy Hariawan Dan Ayu Swaningrum (2015) ditemukan angka PDRB per kapita dan variabel tenaga kerja berpengaruh positif terhadap IPM. Kusuma Hendra (2016) menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi terutama dari kontribusi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hutajulu Halomoan dkk (2012) menunjukkan secara umum manajemen keuangan di Kabupaten Jayapura berjalan kurang efektif. PDRB digunakan sebagai ukuran penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi era otonomi daerah. PDRB perkapita merupakan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk di suatu daerah (KPPOD, 2003).

Tabel 1.
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2016 (dalam persen)

No.	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jembrana	4.37	5.31	5.57	5.38	5.98	6.08	6.12
2	Tabanan	5.37	5.58	5.29	6.03	6.39	6.89	6.99
3	Badung	6.08	6.27	6.81	6.41	6.97	7.00	7.09
4	Gianyar	12.46	9.63	11.04	6.43	6.80	6.89	6.98
5	Klungkung	5.15	5.49	5.69	5.71	6.05	6.85	6.90
6	Bangli	4.74	5.52	5.65	5.61	5.83	5.93	6.03
7	Karangasem	4.85	4.93	5.42	5.81	6.16	6.76	6.16
8	Buleleng	5.53	5.76	6.12	6.71	6.96	6.96	6.06
9	Denpasar	6.17	6.34	6.70	6.54	7.00	7.10	7.20

Sumber: Data diolah, 2017

Pertumbuhan ekonomi Bali sampai tahun 2016 rata-rata telah mencapai angka 6 (enam) persen. Kondisi ini tentunya cukup mengembirakan di tengah suansana krisis yang masih berlangsung sampai saat ini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa krisis yang berlangsung juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Sampai tahun 2016 kabupatn/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Denpasar yaitu mencapai 7,00 persen. Hal ini terjadi karena kota Denpasar merupakan pusat kota yang memiliki karakteristik dengan jumlah penduduk yang tinggi.

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan Pemprov Bali adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Christian von Luebke (2009) berpendapat bahwa tekanan sisi permintaan dari perusahaan lokal, asosiasi dan dewan distrik kurang signifikan dari pada tekanan sisi penawaran dari pemimpin pemerintah daerah dalam menjelaskan variasi perpajakan, praktik perizinan dan praktik korupsi. Dalam transisi awal Indonesia menuju desentralisasi demokratis, tekanan masyarakat terkendala oleh masalah tindakan kolektif dan insentif politik yang sesat. Pemimpin pemerintah daerah, di sisi lain, memiliki kekuatan yang kuat dan insentif baru untuk reformasi kebijakan. Sebagai tanggapan terhadap debat tata

pemerintahan yang baik, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintah merupakan penentu kebijakan yang penting, seringkali di bawah perkiraan, yang dapat mengkompensasi (atau memperparah) cek masyarakat yang lemah dalam transisi ekonomi.

Penelitian Artana Yasa dan Sudarsana Arka (2015) bertujuan untuk mengetahui disparitas pendapatan antar daerah Provinsi Bali dan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan disparitas pendapatan antar daerah Provinsi Bali tahun 2001-2012 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 0,29 artinya tingkat disparitas tergolong rendah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui disparitas pendapatan antar daerah. Pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunan agar memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan agar tercipta suatu kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut menjadi lebih baik dan dapat menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran horisontal dan kewajaran vertikal.

Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip

kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar. Hasil penelitian Brata (2004), Suwandika (2015) dan Laksmi (2013) yang menyatakan PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Artinya apabila peningkatan PAD diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan IPM tidak terlepas dari PAD. Menurut Mardiasmo (2002: 46), PAD memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2016 Kabupaten Badung dengan urutan pertama sebesar Rp. 2.279.113 juta rupiah, disusul oleh Kota Denpasar sebesar Rp. 658.974 juta rupiah dan terendah adalah Kabupaten Bangli yaitu sebesar Rp. 55. 986 juta rupiah.

Realisasi penerimaan PAD di Provinsi Bali rata-rata mengalami peningkatan pada masing-masing Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan fungsinya otonomi daerah harus mampu mengenali potensi yang dimiliki untuk dikembangkan. Menurut Dispenda Provinsi Bali, penerimaan PAD di masing-masing Kabupten/Kota di Provinsi Bali bersumber dari 9 jenis pajak yang dikelola yaitu: hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, parkir, reklame, air tanah, pajak bumi bangunan (PBB), dan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB).

Sedangkan 2 jenis pajak lainnya tidak dikelola karena potensinya tidak ada di wilayah Kabupaten/Kota di Bali.

Selain PAD, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan pembangunan sehingga investasi pada hakekatnya juga merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi (Adnan, 2010). Urgensi tentang pembentukan modal di daerah juga mendapat perhatian dan penekanan oleh Gholamreza (2013) yang menyatakan bahwa investasi swasta memainkan peranan penting dalam membentuk pola pembangunan di daerah. Investasi ini akan menyebabkan terbentuknya modal daerah (*regional capital formation*). Hal ini merupakan konsekuensi logis dari terbatasnya sumber daya, teknologi dan modal yang dimiliki oleh daerah.

Dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah investasi. Beberapa hal yang sebenarnya berpengaruh dalam soal investasi ini. Investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta dapat berasal dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya. Pada penelitian investasi yang digunakan adalah investasi dari sisi PMDN.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang

produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri. Hasil penelitiannya bahwa, PMDN mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional jangka pendek, namun tidak dalam jangka panjang (Sodik dan Nuryadin, 2005). PMDN memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan.

Dari 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2010-2016 PMDN mengalami fluktuasi. Kabupaten dengan pertumbuhan investasi positif adalah di Kabupaten Badung. Selama 5 tahun terakhir PMDN kabupaten Badung selalu meningkat dari tahun ke tahun, begitu juga dengan total PMDN di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali selalu meningkat dari tahun 2009-2016.

Faktor lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Menurut Todaro (2003) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut. Dalam model

sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis (1954), angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern.

Berdasarkan 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2010-2016 jumlah tenaga kerja mengalami fluktuasi. Kabupaten dengan jumlah tenaga kerja terbesar adalah di Kabupaten Bangli. Selama 7 tahun terakhir PMDN Kabupaten Bangli mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, hingga mencapai 86,67 persen di tahun 2016.

Peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah akan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki wilayah tersebut. Salah satu hal yang akan mempengaruhinya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak. Dalam pengukuran dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dikombinasikan. Pengukuran dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kriteria yang digunakan untuk mengetahui tingkat IPM yang digunakan adalah sebagai Tabel 3.

Tabel 3.
Kriteria Tingkat Pembangunan Manusia Berdasarkan IPM

IPM	Kriteia
< 50	Rendah
50 – 65,9	Menengah Bawah
66 – 79,9	Menengah Atas
80 – 100	Tinggi

Sumber: Data diolah, 2017

Perkembangan IPM mencerminkan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Meskipun demikian, tinggi atau rendahnya tingkat IPM belum tentu menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat.

Tabel 4.
**Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten / Kota
 Periode 2010-2016 (persen)**

No.	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jembrana	72,69	73,18	73,62	74,29	75,19	69,66	70,38
2	Tabanan	74,57	75,24	75,55	76,19	77,29	73,54	74,19
3	Badung	75,02	75,35	75,69	76,37	77,27	78,86	79,80
4	Gianyar	72,73	73,43	74,49	75,02	76,35	75,03	75,70
5	Klungkung	70,54	71,02	71,76	72,25	73,05	68,98	69,31
6	Bangli	70,71	71,42	71,80	72,28	73,09	66,24	67,03
7	Karangasem	66,42	67,07	67,83	68,47	69,16	64,68	65,23
8	Buleleng	70,69	71,12	71,93	72,54	73,34	70,03	70,65
9	Denpasar	77,94	78,31	78,80	79,41	79,89	82,24	82,58

Sumber: Data diolah, 2017

Tabel 4 dapat menjelaskan bahwa angka dari masing-masing komponen IPM, dimana IPM dari seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2009-2014 selalu mengalami peningkatan. Bali pada tahun 2010- 2016 tergolong dalam tahap menengah atas antara 66-79,9. Tingkat IPM akan dipengaruhi oleh tingkat PAD sebagai sumber pembiayaan daerah.

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002). Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang tinggi cenderung memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik. PAD berpengaruh positif dengan

petumbuhan ekonomi di daerah. Artinya apabila peningkatan PAD diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah (Brata, 2004). PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan digunakan untuk membiayai belanja-belanja untuk pembangunan daerah yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Tambunan, 2006).

Penelusuran Harrod-Domar terhadap model pertumbuhan ekonomi di negara maju menemukan bahwa akumulasi investasi dan tabungan nasional merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Hasil Penelitian De Fretes (2007), menyebutkan bahwa investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana dengan adanya peningkatan investasi swasta yaitu PMDN akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Studi empiris Ocaya (2012) menemukan bahwa PMDN mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional jangka pendek, namun tidak dalam jangka panjang. Hal ini senada dengan hasil penelitian Samuel Adams (2009) yang menganalisis dampak dari investasi domestik terhadap pertumbuhan ekonomi di Sub-Saharan Africa selama 1990-2003 yang membuktikan bahwa investasi domestik berpengaruh signifikan pada

pertumbuhan ekonomi. Almfraji *et al.* (2014) juga menemukan hasil bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Todaro (2003) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut. Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern.

Cara paling efektif di dalam pembangunan manusia berkelanjutan adalah dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, dengan pemerataan pendapatan (UNDP, 1999). Ranis *et al.* (2000) mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia saling berkontribusi

satu sama lain. Kontribusi pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi ekonomi sehingga output masyarakat juga akan meningkat. Studi Lee Jong Hwa (2003), menyatakan terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Republik Korea periode (1945-2002), telah menjelaskan bahwa antara kedua indikator tersebut memiliki hubungan yang erat. Peningkatan kualitas pembangunan manusia yang semakin baik dapat menjadikan kinerja perekonomian yang semakin meningkat.

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Artinya, PMDN akan memberikan pembentukan modal yang dapat menggerakkan roda perekonomian di suatu daerah. Selain itu pendapatan yang bersumber dari hasil pajak, retribusi, dan hasil-hasil sumber lain yang berasal dari penyerapan penanaman modal dalam negeri di suatu daerah berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah daerah (Pamungkas, 2013).

Ekonomi merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa dengan tujuan meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi memiliki tujuan inti diantaranya peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup, pendapatan, penyediaan lapangan kerja. Hasil penelitian Walalagi dkk. (2017) menyatakan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tenaga Kerja.

Tujuan utama pembangunan daerah selain kemandirian fiskal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik melalui pembangunan manusia yang diukur melalui IPM (Pamudi, 2008). PAD memiliki peran yang sangat penting terhadap IPM, dengan kata lain PAD berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Peningkatan PAD yang diterima pemerintah daerah berarti daerah memiliki cukup dana untuk belanja daerah pada sektor-sektor yang mendukung IPM seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Pamudi (2008), Setyowati dan Suparwati (2012), dan Lugastro (2013) yang mengatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Hubungan antara investasi dengan tenaga kerja telah dinyatakan oleh Sukirno (2000:367) bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran. berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Berbeda dengan pendapat Todaro (2000:329) yang menyatakan bahwa, adalah hubungan negatif antara investasi dan penyerapan tenaga kerja terjadi karena adanya akumulasi modal untuk pembelian mesin dan peralatan canggih yang tidak hanya memboroskan keuangan domestik serta devisa tetapi juga menghambat upaya-upaya dalam rangka menciptakan pertumbuhan penciptaan lapangan kerja baru. Berdasarkan hasil penelitian Sari dkk. (2014) menyatakan bahwa PMDN mempunyai pengaruh

positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja artinya bila jumlah PMDN bertambah maka penyerapan tenaga kerja juga akan bertambah.

Investasi akan mendorong terjadinya akumulasi modal, penambahan stok bangunan gedung dan peralatan lainnya, meningkatkan output potensial suatu daerah dan merangsang pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting peran investasi dalam konteks ekonomi makro, agar ekonomi rakyat dapat berjalan dengan baik, sehingga kita bisa menekan angka kemiskinan dan pengangguran, di setiap kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan teori Harrod Domar yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan investasi, dimana pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi juga akan berdampak pada pembangunan manusia yang diukur dengan IPM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Feriyanto (2016) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif PMDN terhadap IPM di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Di sini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan ”output perkapita”. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan Gross Domestik Produk (GDP) dan teori mengenai pertumbuhan penduduk.

Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Aspek ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut, maka output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Boediono, 1992:1). Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menganalisis faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan ~~ke-~~pada pertumbuhan ekonomi yang berlaku diberbagai negara dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara adalah: kekayaan sumber daya alam dan tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan dan sistem sosial dan sikap masyarakat. Beberapa teori yang menerangkan mengenai hubungan diantara berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sukirno (2008:46) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai perlu dihitung pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku di tahun dasar yang dipilih. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian.

Oleh karena itu konsep yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi adalah GDP dengan harga konstan. GDP adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu (Sukirno, 2008:78). Sedangkan Produk Nasional Bruto adalah nilai barang dan jasa yang

dihitung dalam pendapatan nasional, hanya barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatannya nasionalnya dihitung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PAD, PMDN, Tenaga Kerja dan IPM secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali periode 2010-2016 dan untuk menganalisis pengaruh PAD, PMDN, Tenaga Kerja dan IPM secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali periode 2010-2016.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali termasuk daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, Provinsi Bali memiliki potensi dalam sektor industri pariwisata sehingga akan mendorong minat investor untuk berinvestasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh PAD, PMDN, Tenaga Kerja dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali 2010-2016.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi non partisipan, yaitu observasi yang dilakukan tanpa melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau perusahaan dan hanya sebagai pengumpul data.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan linear berganda yakni dengan model regresi berganda, yang dinyatakan dalam bentuk umumnya adalah sebagai berikut ini:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Pertumbuhan Ekonomi
- X1 = PAD
- X2 = PMDN
- X3 = Tenaga Kerja
- X4 = IPM
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi
- β_0 = konstanta/ intersep
- e = pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari analisis data yang dilakukan maka diperoleh hasil uji analisis regresi linier berganda seperti ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5.
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	61,283	5,355		11,445	0,000
PAD	0,886	0,614	0,185	2,943	0,033
PMDN	1,945	0,540	0,408	3,599	0,001
Tenaga Kerja	0,358	0,360	0,114	1,995	0,044
IPM	0,371	0,043	0,179	2,007	0,040

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 5, didapat persamaan model regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 61,283 + 0,886X_1 + 1,945X_2 + 0,358X_3 + 0,371X_4 + e$$

Sebelum persamaan tersebut digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, maka dilakukan beberapa uji terlebih dahulu.

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Terpenuhi atau tidaknya uji normalitas dapat diuji dengan melakukan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	63
Test Statistic	0,062
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah, 2017

Besarnya nilai Test Statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) adalah 0,062 dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai tersebut menyatakan bahwa data berdistribusi normal, karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ persen.

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui korelasi autokorelasi atau pengaruh data di dalam model regresi. Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi residual yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross sectional*). Jika nilai Durbin watson $> DU < 4-DU$, berarti model yang dibuat tidak terjadi autokolerasi.

Tabel 7.
Hasil Uji Autokorelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.558 ^a	.512	.464	3.44664	1.793

Sumber: Data diolah, 2017

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,793, berdasarkan nilai signifikansi 0,05 dengan N = 63 dan jumlah variabel independen 4 (K = 4), maka diperoleh nilai DU sebesar 1,72. Oleh karena nilai DW sebesar 1,793 lebih besar dari nilai DU sebesar 1,72 dan lebih kecil dari 4-DU ($4-1,72$) = 2,28, artinya tidak terjadi gejala autokorelasi antara variabel bebas.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas atau bebas dari gejala multikolinier. Untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antar variabel bebas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 10 persen atau VIF kurang dari 10, maka model tidak mengandung gejala multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8.
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	0,909	1,100
PMDN	0,925	1,081
Tenaga Kerja	0,907	1,103
IPM	0,988	1,012

Sumber: Data diolah, 2017

Tabel 8 menunjukkan, masing-masing variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 10 persen (0,1) dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga model dikatakan tidak mengandung gejala multikolinieritas.

Jika varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*.

Jika nilai signifikansinya berada di atas 0,05 maka model regresi ini dapat dikatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
PAD	0,511
PMDN	0,516
Tenaga Kerja	0,587
IPM	0,465

Sumber: Data diolah, 2017

Tabel 9 menunjukkan nilai sig. dari masing-masing variabel independen adalah di atas 0,05. Hal ini berarti, seluruh variabel independen bebas dari heteroskedastisitas.

Hasil analisis uji statistik dengan menggunakan program *SPSS* diperoleh nilai F hitung sebesar $6,571 > F$ tabel sebesar 2,53 dan signifikan F hitung sebesar $0,000 < \alpha = 5$ persen atau 0,05, maka H_0 di tolak dan H_1 diterima, yang artinya variabel PAD, PMDN, Tenaga Kerja dan IPM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2016. Hasil ini didukung oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,512 yang memiliki arti bahwa 51,2 persen variasi dari Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2016 dijelaskan oleh PAD, PMDN, Tenaga Kerja dan IPM, sedangkan 48,8 persen sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Berdasarkan nilai t hitung sebesar 2,943 lebih besar dari t tabel 1,671 dan - nilai signifikan t sebesar $0,033 > \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti bahwa variabel PAD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah PAD Kabupaten/Kota, maka semakin meningkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Koefisien regresi variabel PAD (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2016 (Y) sebesar 0,886 memiliki arti bahwa apabila PAD meningkat 1 persen maka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali akan meningkat sebesar 0,886 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002). PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan digunakan untuk membiayai belanja-belanja untuk pembangunan daerah yang selanjutnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Tambunan, 2006).

Felix (2012) berpendapat bahwa pemerintah daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan belanja rutin yang relatif kurang produktif. Jones dan Walker (2007), menyatakan bahwa jumlah pendapatan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kekuatan keuangan pemerintah daerah. Ogujiuba dan Abraham (2012) yang melakukan

penelitian di Nigeria juga memperoleh hasil bahwa pendapatan dan pengeluaran sangat berkorelasi.

Hasil penelitian ini didukung oleh Brata (2004), yang menyatakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang tinggi cenderung memiliki tingkat pendapatan per Kapita yang lebih baik. PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Artinya apabila peningkatan PAD diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan nilai t hitung sebesar 3,599 lebih besar dari t tabel 1,671 dan - nilai signifikan t sebesar $0,001 < \alpha = 0,05$ maka H_1 diterima yang berarti bahwa variabel PMDN secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2016. Artinya, semakin tinggi tingkat PMDN Kabupaten/Kota maka memiliki peluang yang lebih tinggi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Koefisien regresi variabel PMDN (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2016 (Y) sebesar 1,945 memiliki arti bahwa apabila PMDN meningkat 1 persen maka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali akan meningkat sebesar 1,945 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Harrod-Domar terhadap model pertumbuhan ekonomi di negara maju yang menemukan bahwa akumulasi investasi dan tabungan nasional merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian De Fretes (2007), yang

menyebutkan bahwa investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana dengan adanya peningkatan investasi swasta yaitu PMDN akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Menurut Natasha Hamilton-Hart dan Günther G. Schulze (2016) Pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sedikit pada pertengahan 2016 namun masih berada di bawah angka yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Selanjutnya, studi empiris Ocaya (2012) menemukan bahwa PMDN mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional jangka pendek, namun tidak dalam jangka panjang (Ocaya, 2012). Hal ini senada dengan hasil penelitian Samuel Adams (2009) yang menganalisis dampak investasi domestik terhadap pertumbuhan ekonomi di Sub-Saharan Africa selama 1990-2003 yang membuktikan bahwa investasi domestik berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Almfraji, Almsafir, Liu Yao (2014) juga menemukan hasil bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan nilai t hitung sebesar 1,995 lebih besar dari t tabel 1,671 dan - nilai signifikan t sebesar $0,044 < \alpha = 0,05$ maka H_3 diterima yang berarti bahwa variabel tenaga kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2016. Koefisien regresi variabel Tenaga Kerja (X_3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2016 (Y) sebesar 0,358 memiliki arti bahwa apabila Tenaga Kerja meningkat 1 persen maka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali akan meningkat sebesar 0,358 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Todaro (2003) yang menyatakan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Pengaruh positif dari pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut. Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern.

Berdasarkan nilai t hitung sebesar 2,007 lebih besar dari t tabel 1,671 dan - nilai signifikan t sebesar $0,040 < \alpha = 0,05$ maka H_4 diterima yang berarti bahwa variabel IPM secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2016. Koefisien regresi variabel IPM (X_4) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2016 (Y) sebesar 0,371 memiliki arti bahwa apabila IPM meningkat 1 persen maka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali akan meningkat sebesar 0,371 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ranis et al. (2000) mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia saling berkontribusi satu sama lain. Kontribusi pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi ekonomi sehingga output masyarakat juga akan meningkat. Studi Lee Jong Hwa (2003), menyatakan terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Republik Korea periode (1945-2002), telah menjelaskan bahwa antara kedua indikator tersebut memiliki hubungan yang erat. Peningkatan kualitas pembangunan manusia yang semakin baik dapat menjadikan kinerja perekonomian yang semakin meningkat.

SIMPULAN

Secara simultan PAD, PMDN, Tenaga Kerja, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2016. Secara parsial PAD, PMDN, Tenaga Kerja, dan IPM

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2016.

Pemerintah bersama-sama masyarakat dan pihak swasta tetap berusaha untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Bali ini. Diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan investasi khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga hal tersebut dapat memberikan tingkat kesejahteraan pada masyarakat serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

REFERENSI

- Almfraji, Mohammad Amin., Mahmoud Khalid Almsafir dan Liu Yao. 2014. Economic Growth and Foreign Direct Investment Inflows: The Case of Qatar. *Journal Procedia - Social and Behavioral Sciences* 109: pp: 1040 – 1045.
- Alp Ozel, Hasan et al. 2013. Investigation Of Economic Growth and Unemployment Relationship for G7 Countries Using Panel Regression Analysis. *International Journal Of Business and Social Science*, 4(6): pp: 163 – 164.
- Andirfa, Mulia. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Darussalam. Banda Aceh.
- Artana Yasa, I Komang Oka; Arka, Sudarsana. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], nov. 2015. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/16494>>. Date accessed: 11 sep. 2017. *Vol. 8, No. 1, pp: 1-112*
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Bali Dalam Angka*. Denpasar: BPS Bali.
- Boediono. 1992. *Ekonomi Makro*. Edisi 4. BPFE: Yogyakarta.

- Blane D. Lewis (2006) Local government taxation: An analysis of administrative cost inefficiency. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 42(2) : 213-233
- Brata, Aloysius Gunadi, 2004 *Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya.
- Christian von Luebke (2009) The political economy of local governance: findings from an Indonesian field study. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 45(2) : 201-230
- De Fretes, Pieter N. 2007. Analisis tentang Pengaruh Investasi terhadap Pembangunan Ekonomi di Propinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. 5(1): h: 1-23.
- Fajri, Muhammad; Delis, Arman; Amzar, Yohanes Vyn. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], jan. 2017. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/27422>>. Date accessed: 11 sep. 2017. Vol. 9, No. 2, pp: 99 – 107
- Felix, Olurankinse. 2012. Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*. 4(1) : 1-6.
- Hariwan, Peggy; Swaningrum, Ayu. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran Di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], nov. 2015. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/16496>>. Date accessed: 11 sep. 2017. Vol. 8, No. 1, pp: 72-82
- Hutajulu, Halomoan; Sanggrangbano, Agustina; Bonay, Antonia K. Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], oct. 2012. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/1903>>. Date accessed: 12 sep. 2017. Vol. 5. No. 2, pp:79-150
- Jones, Stewart dan R., G., Walker. 2007. Explanators of local Government Distress. *Journal ABACUS*. 43(3) : 396-418.
- KPPOD, Tim Peneliti. 2002. *Pemeringkatan Daya Tarik Investasi 134 Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jakarta: Laporan Pelaksanaan Pemantauan Otonomi Daerah.

- Kusuma, Hendra. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], july 2016. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/22735>>. Date accessed: 11 sep. 2017. Vol. 9, No. 1, pp: 1-92
- Laksmi Dewi, Sakita. 2013. Pengaruh PAD, PMA, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 2(11): h: 502-512.
- Lewis, Artur. 1954. *Economic development with unlimited supplies and Labour*. England: Manchester School.
- Lee Jong Hwa. 2003. [Growth and Adjustment in East Asia and Latin America](#). *Economía* 5 (1): pp: 69-134.
- Lugastoro, Decta Pitron. 2013. Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1(2): h: 01-19.
- Malik, Shahnawaz, Mahmood-ul-hassan and Shahzad Hussain. 2006. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Pakistan. *The Pakistan Development of Journal*, 45(4): pp:845-854.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mankiw, N. Gregory, 2003. *Pengantar Ekonomi*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Natasha Hamilton-Hart & Günther G. Schulze (2016) Taxing Times in Indonesia: The Challenge of Restoring Competitiveness and the Search for Fiscal Space, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 52(3) : 265-295.
- Nelly, Nur Laili. 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 1990-2004. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Nur Feriyanto. 2016. The effect of employment, economic growth, and investment on HDI: In provinces in Indonesia. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 19(1): h: 1-12.
- Ocaya, Bruno., Charles Ruranga & William Kaberuka. 2012. Dynamic Relationship between Gross Domestic Product and Domestic Investment in Rwanda. *World Journal of Education*, 2(6).

- Ogujiuba, Kanayo and Abraham, Terfa W. 2012. Testing the Relationship between Government Revenue and Expenditure: Evidence from Nigeria. *International Journal of Economics and Finance*. 4(11) : 172-182.
- Pamudi, Septian Bagus. 2008. Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian, Bogor.
- Pamungkas, Ifan Restu Bagus. 2013. Analisis Pengaruh Pmdn, Pma, Dan Pdrb Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Pati Tahun 1982-2011. *Economics Development Analysis Journal*. 2(4): h: 257-268.
- Ranis G. and Frances Stewart, 2000. Economic Growth and Human Development. *World Development* 28(9): pp: 197-219.
- Samuel, Adams. 2009. Can foreign direct investment (FDI) help to promotegrowth in Africa *African Journal of Business Management*. 3(5): pp: 178-183.
- Sari, Aprilia Dwi Ratna., Dody Setyadi., dan Umar Farouk. 2014. Analisis Pengaruh Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah (Periode 1985-2014). *Skripsi*. Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Semarang.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati, 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Pretasi*. 9(1): h: 113-133.
- Sidik, Machfud, 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). *Seminar*. Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia. STIA LAN Bandung.
- Sodik, Jamzani., dan Nuryadin, Didi. 2005. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus pada 26 Propinsi di Indonesia Pra dan Pasca Otonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 10(2): pp: 157-170.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suwandika, P., dan Nyoman Mahaendra Yasa. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat

Pengangguran Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*, 4 (7): h: 794-810.

Tambunan, Tulus. 2006. *Upaya-Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*. [diunduh pada tanggal 14 Januari 2015, melalui: www.kardin-indonesia.or.id].

Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wahyuni, Putri Ayu. 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 3(8).

Walalangi, Stasya., Rosalina A.M. Koleangan, dan Hanly F. DJ. Siwu. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 17(1): h: 171-182.

Widiana, I Nyoman Wahyu dan I Ketut Suidiana. 2015. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hotel Restoran Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(11): h: 1357-1390.